

**PENGATURAN POLA KOORDINASI BANK INDONESIA DENGAN OTORITAS
JASA KEUANGAN TERKAIT PENGAJUAN PERMOHONAN KEPAILITAN BANK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

KRISTIAN BAYU PERMANA

115010107111137



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015



DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Ringkasan	v
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Tentang Bank	10
B. Kajian Umum Tentang Bank Indonesia Dan Kewenangannya	14
C. Kajian Umum Tentang OJK Dan Kwenangannya	19
D. Kajian Umum Tentang Kepailitan	23
E. Kajian Umum Tentang Pengajuan Permohonan Kepailitan Bank	33
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	37
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum	39
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	39
F. Definisi Konseptual	40
 BAB IV PEMBAHASAN	
A. Peran OJK Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Lembaga Perbankan	44
B. Peran Bank Indonesia dalam Pengaturan Dan Pengawasan lembaga perbankan	52
C. Kepailitan bank menurut Unadang-Undang Kepailitan dan PKPU	56
D. Pola koordinasi Bank Indonesia dengan OJK terkait Pengajuan permohonan kepailitan bank	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

80

B. Saran

81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

